

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUKA DAMAI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
penyusuna skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

**Kiki Oktavianti Dewi
NPM : 157110052**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini, dengan demikian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kemakluman dan bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang sangat besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak Indra Safri, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf/pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru umumnya, yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
8. Kepala Desa serta perangkat Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.

9. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tersayang dan semua sahabat yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis bermohon kepada Allah Swt semoga jasa baik beliau mendapatkan balasan dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarobbal alamin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, 21 Desember 2020
Penulis,
ttd

Kiki Oktavianti Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Administrasi.....	22
2. Konsep Administrasi Publik	25
3. Konsep Organisasi	26
4. Konsep Organisasi Publik.....	27
5. Konsep Manajemen.....	29
6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	31
7. Konsep Kebijakan	32

8. Konsep Kebijakan Publik.....	36
9. Konsep Pelaksanaan.....	37
10. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	38
11. Konsep Pengawasan.....	40
12. Konsep Pemerintah Desa	41
13. Konsep Pemberdayaan.....	43
B. Kerangka Pikir	44
C. Konsep Operasional	45
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	48
E. Teknik Pengukuran	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	55
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	60
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
A. Sejarah Ringkas Kabupaten Rokan Hulu.....	61
B. Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam.....	66
C. Sejarah BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya.....	68
D. Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya.....	69
E. Fungsi dan Tugas Organisasi	71
F. Bidang Usaha BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Responden	73

B. Pelaksanaan Tugas dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	75
C. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	89
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Distribusi Jumlah Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	16
I.2 : Pemegang Otoritas dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	16
I.3 : Program Perencanaan dan Penetapan Badan Usaha Milik Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2018	17
II.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	49
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	55
III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .	60
IV.1 : Statistik Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu	62
IV.2 : Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Rokan Hulu	64
IV.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu	65
IV.4 : Jumlah Penduduk Desa Kota Raya Kabupaten Rokan Hulu....	67
V.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	73
V.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74

V.3	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	74
V.4	: Jawaban Responden Terkait Menetapkan Standar yang Akan Dicapai	76
V.5	: Jawaban Responden Terkait Mengukur Pelaksanaan Kinerja .	79
V.6	: Jawaban Responden Terkait Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar	82
V.7	: Jawaban Responden Terkait Mengambil Tindakan Perbaikan	85
V.8	: Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	89
V.9	: Data Sekunder Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	12
II.1	: Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	45
IV.1	: Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Pengawas BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	98
2	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Direktur BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	103
3	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bendahara BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	108
4	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Unit BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	113
5	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	118
6	: Daftar Pertanyaan Kuesioner / Angket Penelitian Anggota BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	123
7	: Daftar Data Sekunder Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	135
8	: Dokumentasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	139

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Oktavianti Dewi
NPM : 157110052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2020
Pelaku Pernyataan,

Kiki Oktavianti Dewi

**PELAKSANAAN TUGAS PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM PENGAWASAN PENGEMBANGAN USAHA DAN
EKONOMI MASYARAKAT DESA KOTA RAYA
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

Linda Nur Umawati
NPM. 157110269

ABSTRAK

KATA KUNCI : Pengawasan, Standar, Pelaksanaan, Umpan Balik, Perbaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Variabel penelitian adalah Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan tugas pengurus BUMDes. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang Pengawas, satu orang Direktur, satu orang Bendahara, dua orang Kepala Unit dan satu orang Kepala Desa, sedangkan responden penelitian adalah 100 orang masyarakat anggota aktif BUMDes. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner, dimana hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan tugas pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah cukup terlaksana. Bentuk pelaksanaan tugas berupa menetapkan standar yang akan dicapai, mengukur pelaksanaan kinerja BUMDes, membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang sudah direncanakan dan mengambil tindakan perbaikan diketahui sudah cukup terlaksana diketahui dari pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes secara transparan dan akuntabel.

**IMPLEMENTATION OF DUTIES OF VILLAGE OWNED BUSINESS
AGENCIES IN SUPERVISION AND BUSINESS DEVELOPMENT
COMMUNITY ECONOMY IN KOTA RAYA VILLAGE
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
ROKAN HULU DISTRICT**

**Linda Nur Umawati
NPM. 157110269**

ABSTRACT

**KEYWORDS : Supervision, Standards, Implementation, Feedback,
Improvement**

This study aims to determine the results of the implementation of the duties of the Village-Owned Enterprise Management in Supervision of Business Development and Community Economy and the inhibiting factors in the Implementation of the Duties of Village-Owned Enterprises Management in Supervision of Business Development and Community Economy in Kota Raya Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The research variable is implementation, namely the implementation of the duties of the BUMDes management. This type of research is qualitative and quantitative research with descriptive methods. The location of this research is in the village of Kota Raya, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The informants in this study were one supervisor, one director, one treasurer, two unit heads and one village head, while the research respondents were 100 active members of BUMDes. The research data comes from primary data obtained through interviews and questionnaires, where the research results were analyzed descriptively. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the duties of the Village-Owned Enterprises management in supervising business development and community economy in Kota Raya Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency is quite accomplished. The form of implementation of duties is in the form of setting standards to be achieved, measuring the implementation of BUMDes performance, comparing performance according to the planned standards and taking corrective action which is known to have been sufficiently implemented.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap organisasi publik maupun swasta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya, pembagian kerja, pelimpahan wewenang sampai kepada rincian tugas secara jelas disetiap masing-masing pihak yang terkait dalam organisasi tersebut. Di samping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerja sama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk dijadikan pegangan bagi para pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis.

Dewasa ini, kedudukan dan peran birokrasi berkembang dengan pesat dan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi kedepan dalam rangka menjapai tujuan, demikian juga fungsi dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam suatu organisasi pemerintah. Secara umum kantor dapat diartikan sebagai tempat dimana dilakukan berbagai macam kegiatan pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, akan tetapi dengan perkembangannya dewasa ini kantor mempunyai makna lebih dari hanya sebagai tempat melainkan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan disegala bidang.

Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna Siagian (Dalam Zulkifli, 2005;20),

administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni didalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen Terry (dalam Zulkifli, 2005:28) mengatakan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan bidang digunakan bak ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Sesuai dengan konsep manajemen sebagai inti administrasi yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan managerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya organisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDes.

Pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota pasal 95 ayat 1 PP 11/2016.

Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti pemerintah Kabupaten/Kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60% dari bagian 10% itu dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan 40% sisanya dibagi secara proposional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Penetapan pembangunan Desa yang dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diketahui jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme *controll* dari masyarakat dan perwakilan masyarakat di Desa sebagai pengawasan APBD yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan dana Desa tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) adalah peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perancangan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan APBDesa Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen” Desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan penggolongan. BPD adalah lembaga

Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama dengan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan menjadi peraturan desa. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan Desa tahunan dan perencanaan anggaran tahunan, APBDes pada dasarnya merupakan perencanaan instrument kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan atau anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa Suka Damai melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pembangunan desa, pihak-pihak yang terlibat yaitu Pemerintahan Desa yang berperan sebagai pengelola, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan lembaga Desa lainnya sebagai pengawas, serta teknisi atau tukang sebagai pembuat bangunan beberapa pembangunan tersebut dalam program APBDes.

Kegiatan pembangunan di Desa Suka Damai masih belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait kegiatan perencanaan pembangunan Desa yang ditetapkan melalui peraturan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pencapaian dan penetapan pembangunan Desa tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa.

Peraturan Desa Suka Damai Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 001/188.3/Perdes/1/2016 tentang tata kerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singing bahwa pada pasal 5 BPD ,memiliki tata kerja:

1. Mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan tetap atau tunjangan.
2. Merencanakan dan menetapkan anggaran.
3. Meminta keterangan, mengajukan dan pendapat dari Kepala Desa
4. Mengadakan perubahan rancangan peraturan Desa berdasarkan kepentingan masyarakat .
5. Pengayoman kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang sifatnya menunjang kelangsungan pembangunan.
6. Menyelenggarakan legalisasi dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa serta keputusan kepala Desa.
8. Menghadiri rapat/musyawarah Desa.
9. Menghadiri atau masuk kantor Desa 2 kali dalam sebulan.

Pengawasan APBDes oleh BPD di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi melalui jumlah BPD yang berperan didalam pengawasan APBDes sebagai berikut:

Tabel 1.1 Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2012-2018

No	Nama lengkap	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	H. Rusli S.E	Ketua	S1	Non PNS
2	Abd. Ober S.Pd	Wakil	S1	Non PNS
3	Randy	Anggota	SMA	Non PNS
4	Makrul	Anggota	SMP	Non PNS
5	M. Arman	Anggota	SMP	Non PNS
6	Atan	Anggota	SMP	Non PNS
7	Arif Budiman	Anggota	SMP	Non PNS

Sumber: Kantor Desa Suka Damai, 2019

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantang Singingi dengan jumlah 7 orang yang memiliki jabatan dan pendidikan. Hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan setara menjadi mitra kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Damai berpedoman kepada pembuat kebijakan yang telah disepakati bersama antara lain yaitu peraturan APBDes. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Pengawasan BPD terhadap APBDes ini dilakukan mulai dari Perencanaan Pembuatan APBD, Pembahasan dan Penetapan menjadi dalam bentuk. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Damai terhadap pelaksanaan pendapatan dan belanja Desa (APBDes), antara lain:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Desa
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan Desa

Pengawasan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan BPD tidak terlepas dari Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan menetapkan perencanaan pembangun Desa yang akan ditetapkan dan dilaksanakan tentunya BPD ikut serta terhadap kegiatan Musrembang tersebut sehingga secara tidak langsung

BPD melakukan pengawasan akan kegiatan pembangunan yang akan di tetapkan. Adapun berikut kegiatan musyawarah desa bersama dengan pemerintah desa, unsur masyarakat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan BPD sebagai berikut:

Tabel I.2 Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Mengikuti Musyawarah Suka Damai
1	Unsur masyarakat Desa
2	Lembaga Masyarakat Desa
3	Badan Permusyawaratan Desa

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2020

Berdasarkan tabel di atas Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa keikutn serta di dalam musyawarah meliputi Unsur masyarakat Desa, Lembaga Masyarakat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun peraturan Desa Suka Damai Nomor 7 tahun 2019 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebgai berikut:

Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016- 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa	955.922.000	100.340.000	211.520.000
2	Pendapatan Transfer	597.092.000	1.031.056.000	1.273.044.000
	Alokasi Dana Desa	147.900.000	242.875.000	445.256.000
	Bantuan Keuangan Provinsi	12.000.000		100.000.000
	Dana Desa		760.527.000	699.089.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		27.654.000	
	Hasil Usaha Desa			15.000.000
	Pendapatan Lain-lain			196.520.000
	Jumlah Pendapatan	955.922.000	1.131.396.000	1.484.564.000
1	Belanja	1.443.992.000	1.155.496.000	1.483.001.000
	Belanja Pegawai		294.840.000	415.440.000
	Belanja Barang dan Jasa		80.647.900	414.895.700
	Belanja Modal		780.008.100	652.665.300
2	Penerimaan Pembiayaan / Pinjaman	488.000.000	24.266.000	98.437.000
3	Pengeluaran Pembiayaan / Pinjaman	-	-	100.000.000

Sumber : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016- 2018

Berdasarkan tabel di atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016- 2018. Diketahui dari penjelasan di atas anggaran Pendapat dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Suka Damai dengan pendapatan desa Rp. 1.484.564.000. hal ini perlunya BPD berperan di dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan berdasarkan APBDesa.

Mekanisme pengawasan oleh BPD yaitu pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (badan permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan system. Pemerintahan akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Dan audit dari badan pemeriksa keuntungan (BPK) untuk memeriksa semua penyenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Masyarakat Desa sangat berharap agar BPD bisa berjalan fungsinya untuk mengawasi pengguna dana Desa tersebut.

Pelaksanaan BPD dalam pengawasan APBDes dalam pengelolaan APBDes. BPD melakukan kegiatan yang sama yakni melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan APBDes lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk APBDes tahun mendatang. Forum BPD ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, dapat juga mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari minimal Rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Masyarakat secara personal, baik berasal dari tokoh bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik Desa dapat memberikan saran serta masukan pada tahap ini baik kepada pemerintah Desa atau forum BPD berkaitan dengan rancangan APBDes.

Masalahnya terkadang BPD tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang partisipatif, forum BPD menjadi elit Desa semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan APBDes yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasan

sebagaimana salah satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dimana diketahui bahwa pengawasan APBDes oleh BPD belum berlangsung dengan baik mulai dari perencanaan penetapan hingga hasil pelaksana APBDes sehingga upaya perencanaan sampai dengan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan BPD belum melaksanakan fungsinya di dalam melakukan pengawasan akan penetapan dan pelaksanaan APBDes tentu hal ini disebabkan juga oleh Kemampuan BPD di dalam memahami penetapan APBDes dan keaktifan BPD di dalam Musyawarah akan Perencanaan dan penetapan APBDes sehingga berdasarkan penjelasan di atas adapun yang menjadi fenomena di dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Diketahui Pengawasan APBDes yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai belum terlaksana dengan maksimal dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa sementara dikatakan pada Peraturan Desa Suka Damai Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 001/188.3/Perdes/1/2016 tentang tata kerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singing pada pasal 5 BPD antara lain Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa serta keputusan kepala desa.

2. Diketahui kemampuan pengawasan Badan Permusyawaratan masih kurang memiliki otoritas di dalam kegiatan Pengawasan APBDes hal ini dikarenakan BPD belum aktif di dalam penetapan APBDes dikarenakan keterbatasan kemampuan.
3. Diketahui masih kurang maksimalnya pengawasan BPD terkait Ketetapan Peraturan APBDes. Hal ini dikarenakan Kepala Desa cenderung mengendalikan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) di dalam perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga BPD terkesan hanya sebagai kekuatan pendukung kinerja Kepala Desa, sementara BPD dan Kepala Desa adalah mitra kerja di dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.”**

B. Perumusan Masalah

Dari sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:” bagaimana hasil Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

- a. Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian mengenai pengelolaan sampah, serta diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

- b. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber informasi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

c. Peraktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011:19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009:9) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep Administrasi yaitu :

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam sekuruh bidang kegiatan organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan Pemerintahan (Kasim, 1993: 21). Menurut

Gordon (dalam Kasim 1993: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998) menyatakan administrasi public harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 1989: 106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.
2. Teori normative : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asumtif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan

perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan public.

2. Konsep Organisasi Publik

Konsep organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek studi administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005:26).

Sedangkan menurut Hamim (2005:24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2006:24) bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Istilah publik berasal dari privat berasal dari bahasa Latin, di mana publik berarti “*of people*” (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “*set apart*” (yang terpisah) dalam literatur administrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu Kusdi, (2009:25). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Kita bisa menyebutkan beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Jadi, secara sederhananya, organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2). Yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3). Mempunyai

kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi Pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5). Melayani keperluannya 6). Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi public sering dilihat pada bentuk organisasi Pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi Pemerintah (organisasi Pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

3. Konsep Manajemen Publik

Selanjutnya Winardi (2010;3) mengemukakan Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”

Menurut Hasibuan (2006;2) Manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan manajemen merupakan :

“Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh

individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Syafri (2012:12) menjelaskan manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.

Winardi (2010:79) menyebutkan bahwa, tugas Pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Dalam Winardi memberikan argumentasi bahwa manajemen Pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial Pemerintahan sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejujuran yang tinggi
8. Antisipatif

Berdasarkan penjelasan penelitian menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah adanya pembagian kewenangan melalui mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

4. Konsep Pengawasan

Menurut Hani (2012;359), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Manullang (2008;173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Menurut Zulkifli (136; 2009) secara empiric terdapat 4 teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan yaitu :

1. Pengawasan langsung atau abservasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kelebihan teknik ini adalah: memperoleh informasi on the spot tentang jalannya kegiatan operasional; dan meluruskan secara langsung setiap kesalahan yang ditemukan; para bawahan merasa diperhatikan secara langsung oleh pimpinannya. Kelemahan utama teknik ini adalah pelaksanaannya relative dapat menyita banyak waktu pimpinan.
2. Pengawasan melalui laporan baik lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh karyawan melalui para penyedia yang sehari-hari ditugaskan mengawasi secara langsung kegiatan para bawahan nya. Aspek positif teknik ini disamping dinilai lebih ekonomis juga dapat memperoleh informasi negative dari kegiatan operasional yang segera untuk di tangai.
3. Pengawasan melalui kuesioner. Suatu untuk mengetahui informasi untuk data sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasioanal oleh para karyawan dalam hal-hal lain yang tentang kondisi organisasi, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab atau member tanggapan atas sejumlah kuis (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu. Daftar pertanyaan yang digunakan sebagai alternative media pengawasan ini sebelum nya sudah dirancang sesuai dengan substansi kebutuhan dan tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut. Dalam hal ini biasanya responden nya adalah pelaksanaan kegiatan operasional. Teknik ini akan bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tanaga operasional.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional. Sebaliknya pihak manajemen memutuskan terlebih dahulu untuk wawancara yang digunakan untukmengahindari bias yang bersifat peribadi, cultural maupun keperilakuan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang

membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan kan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut handayani (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

5. Konsep Demokrasi

Menurut Ubaidillah (2008;39) demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Sharma, (2004;4) dalam perkembangannya, ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Menurut Held (2004;56) Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis

lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

6. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Ndraha (2003;44) Pemerintah Desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah Desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.”

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam pemerintahan Desa tentunya didasarkan pula pada prinsip *akuntabilitas, transparansi dan responsivitas*. *Akuntabilitas* maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan proses *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya adalah *transparansi*, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian *responsivitas* berkaitan dengan daya tanggap pemerintah Desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan Desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan Desa.

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Desa yang dimaksudkan disini adalah kepala Desa sekaligus keseluruhan perangkat Desa termasuk BPD, tentunya tidak mesti berpijak pada tiga hal tadi. Menurut Prajudi (1981;79) dalam bukunya menerangkan ada beberapa hal yang juga perlu adalah diantaranya. “efektifitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah

ditetapkan, moralitas yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat dan etika umum maupun etika kedinasan wajib dijunjung tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang membantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007;171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/WaliKota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah Desa yang begitu berat maka perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

7. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Rumanti (2002;71) Fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Menurut H.A.W Widjaja (2005;279) beliau mengemukakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi *representasi*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan Desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, dimana BPD sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

8. Konsep Desa dan Otonomi Desa

1. Desa

Menurut Juliantara (2000;18) Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, Desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, Desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan Desa”.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan *“Development Community”* dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai *“Independent Community”* yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki Desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan .
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi Desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat Desa.

Menurut Jualiantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi Desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Menurut Sutoro (2005;74) Otonomi Desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang Desa yang ada hingga saat ini maka otonomi Desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007;31) menyebutkan bahwa Desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan Desa di bawah Kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke Kabupaten dan Desa. Tujuannya agar tidak terjadi

penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

9. Konsep Kinerja

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Selanjutnya Gibson (2000:40), mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motifasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi.

Menurut Mangkunegara (2002:67), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikannya padanya. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Sinambela dkk (2006:136), mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa dikatakan kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikanya padanya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Dini Annisa Tifany (2015)	Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2014 Langgam Kabupaten Pelalawan.	Pengawasan, APBDes.	Tujuan Penelitian, Teori yang digunakan, Lokasi Penelitian, Metode Kuantitatif

2	Amalia Pertiwi (2017)	Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pinggir Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Pengawasan, APBDes. BPD.	Teori yang digunakan, Lokasi Penelitian, Metode Kuantitatif, hasil penelitian
3	Ichwann Hastona (2015)	Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.	Pengawasan, APBDes. BPD, Metode Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Teori yang digunakan, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2010

Berdasarkan table di atas Penelitian terdahulu bahwa Persamaan dengan penelitian yang dilakukan bahwa objek penelitian yang sama tentang pengawasan APBDes, pelaksana Pengawasan BPD. Sedangkan Perbedaannya adalah Tujuan Penelitian, Teori yang digunakan, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II. 1 Kerangka Pikir tentang Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka adapun konsep operasional yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah orang-orang yang melakukan proses kerjasama antara yang didasari oleh pertimbangan rasional (akal sehat) dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkan.
- b. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

- c. Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.
- d. Pengawasan adalah Kegiatan mengamati ketetapan yang dilaksanakan terhadap kesesuaian dengan ketetapan kebijakan yang dibuat.
- e. BPD adalah Badan Pemberdayaan masyarakat Desa yang berfungsi antara lain penyelenggara kegiatan pembangunan Desa.
- f. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa di Setiap tahunnya.
- g. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
- h. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
- i. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

- j. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
- k. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara Bersama.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi	Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Penentuan standar pelaksanaan	a. Pengawasan perencanaan APBDes. b. Pengawasan hasil ketetapan APBDes.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Hasil kegiatan Pembangunan. b. Hasil anggaran pembangunan.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
(2014 ; 212)		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Hasil Pengawasan Pembangunan b. Dampak Pengawasan APBDes terhadap pembangunan	Berfungsi Cukup Berfungsi
		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan.	a. Pengawasan APBDes dengan ketetapan pembangunan dilapangan. b. Pengawasan APBDes terhadap pencapaian kegiatan	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Melakukan Perubahan bentuk pengawasan. b. Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan.	Berfungsi Cukup Berfungsi

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat di nilai melalui indikator berikut :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran (Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi didalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh BPD. Adapun memilih lokasi

penelitian ini dikarenakan belum terlaksananya pengawasan BPD terkait Ketetapan Peraturan APBDes Hal ini dikarenakan Kepala Desa cenderung Mengendalikan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) di dalam perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan Desa sehingga BPD terkesan hanya sebagai kekuatan pendukung kinerja Kepala Desa, Sementara BPD dan Kepala Desa adalah mitra kerja didalam penyelenggaraan pembangunan di Desa

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. (Sugiyono 2012:80).

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Masyarakat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.I : Populasi dan Sampel Penelitian Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua BPD	1	1	100%
2	Anggota BPD	6	6	100%
3	Kepala Desa	1	1	100%
4	Masyarakat Desa	1.559	30	52%
	Jumlah	1.564	38	-

Sumber : Olahan penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2012 ; 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. sehingga sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 8 sampel.

Adapun sampel penelitian terhadap Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, yakni menggunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah teknik penarikan sampel yang semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dikarenakan populasi relative kecil.

Masyarakat Desa yakni menggunakan teknik *Purposive Sampling Yaitu* Teknik penarikan sampel yang merupakan responden penelitian dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana sampel yang diambil dianggap dapat mewakili seluru jumlah populasi karena populasi jumlahnya sangat besar sehingga sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan APBDes, buku-buku pendukung Penelitian, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Wawancara (*interview*), yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer. Melalui wawancara terhadap Ketua BPD dan kepala Desa.
3. Daftar pertanyaan (*Quesioner*), yakni dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada responden penelitian, untuk mendapatkan data mengenai Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif yang diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menghubungkan pada konsep pengukuran yang telah ditentukan, kemudian diambil kesimpulannya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah

desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi, yaitu 1.953,66 km², kemudian diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir seluas 1.530,97 km² (Sumber: kuansing.go.id)

B. Kecamatan Kuantan Singingi Hilir

1. Profil

Kecamatan Kuantan Singingi Hilir adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Benai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan kuantan singingi hilir, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi. Ibukota Kecamatan kuantan singingi hilir terletak di Koto Sentajo.

Kecamatan Kuantan Singingi Hilir terdiri dari 15 desa/kelurahan, yaitu Desa Pulau Kopung, Desa Kampung Baru, Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Desa Pulau Komang, Kelurahan Beringin Jaya, Desa Jalur Patah, Desa Teratak Air Hitam, Desa Seberang Teratak Air Hitam, Desa Parit Teratak Air Hitam, Desa Geringging Baru, Desa Marsawa, Desa Langsung Hulu, Desa Muara Langsung, dan Desa Geringging Jaya.

2. Geografis

Kecamatan Kuantan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Benai
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangean & Logas Tanah Darat.

Topografi Kecamatan Kuantan Singingi Hilir merupakan tanah datar dan berbukit-bukit, dengan ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan kuantan singingi hilir pada lapisan atas berjenis hitam gembur, dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning. Iklim di Kecamatan kuantan singingi hilir merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara $19,5^{\circ}\text{C}$ - $34,2^{\circ}\text{C}$, sedangkan musim yang ada di kecamatan ini adalah musim hujan dan musim kemarau. Sungai besar yang mengalir di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah Sungai Kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan muaranya ke Kabupaten Indragiri Hulu.

Daerah terluas di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah Desa Seberak Teratak Air Hitam dan Desa Jalur Patah, sedangkan wilayah terkecil

di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah Desa Geringging Baru dan Desa Geringging Jaya. Berikut luas wilayah Kecamatan kuantan singingi hilir menurut Desa/Kalurahannya.

Tabel IV.1 Luas Wilayah Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Pulau Kopung	6	3,5%
2	Kampung Baru	9	5,2%
3	Koto Sentajo	6	3,5%
4	Muaro Sentajo	8	4,6%
5	Pulau Komang	8	4,6%
6	Beringin Jaya	11	6,3%
7	Jalur Patah	28	16,2%
8	Teratak Air Hitam	17	9,8%
9	Seberang Teratak Air Hitam	28	16,2%
10	Parit Teratak Air Hitam	17	9,8%
11	Geringging Baru	5	2,9%
12	Marsawa	9	5,2%
13	Langsat Hulu	6	3,5%
14	Muara Langsat	10	5,8%
15	Geringging Jaya	5	2,9%
	Jumlah	173	100%

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

3. Pemerintahan

Kecamatan Kuantan Singingi Hilir terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Desa Koto Sentajo. Kecamatan kuantan singingi hilir dipimpin oleh seorang camat, sekretaris camat dan staf pemerintahan lainnya yang menunjang pemerintahan kecamatan. Dari keseluruhan desa/kelurahan di Kecamatan kuantan singingi hilir, Kampung

Baru Sentajo dan Beringin Jaya termasuk ke dalam klasifikasi swasembada sedangkan 13 desa/kelurahan lainnya termasuk ke dalam klasifikasi swadaya.

Setiap desa/kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah dibantu perangkat desa/kelurahan, yaitu sekretaris, kaur umum, kasi pemerintahan, kasi PMD dan kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun struktur Kecamatan kuantan singingi hilir adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2 Nama Pejabat dalam Struktur Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Menurut Jabatan Tahun 2016

No.	Jabatan	Nama
1	Camat	Hazrianto, S.Sos.
2	Sekretaris Camat	Rohaya (Plt)
3	Kasi Pemerintahan	Don Herbet
4	Kasi PMD	Rusdi
5	Kasi Trantib	Rohaya
6	Kassubag Keuangan	Artati, SE.
7	Kassubag Umum	Syafri Efendi, SE.
8	Kassubag Program	Sobstib, SP.

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

Sedangkan struktur Kecamatan Kuantan Singingi Hilir adalah sebagai berikut.

Tabel IV.3 Nama Kepala Desa/Lurah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah
1	Pulau Kopung	Maspur
2	Kampung Baru	Jamlus
3	Koto Sentajo	Heprianto
4	Muaro Sentajo	Syawalludin
5	Pulau Komang	Syafri Efendi
6	Beringin Jaya	Mardi Andesta
7	Jalur Patah	Don Herbet
8	Teratak Air Hitam	Syamsul Haidi
9	Seberang Teratak Air Hitam	Drs. Martayulis
10	Parit Teratak Air Hitam	Dadang Mulyana
11	Geringging Baru	Muhtar
12	Marsawa	Yatino
13	Langsat Hulu	Suripta
14	Muara Langsat	Suripta
15	Geringging Jaya	Rudi Elianto

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

Berdasarkan status pemerintahan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan kuantan singingi hilir, hanya terdapat satu kelurahan dari 15 desa, dan selebihnya berstatus sebagai desa. Lebih jelasnya mengenai status Desa Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4 Desa/Kelurahan Menurut Status Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan
1	Pulau Kopung	Desa
2	Kampung Baru	Desa
3	Koto Sentajo	Desa
4	Muaro Sentajo	Desa
5	Pulau Komang	Desa
6	Beringin Jaya	Kelurahan
7	Jalur Patah	Desa

No.	Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan
8	Teratak Air Hitam	Desa
9	Seberang Teratak Air Hitam	Desa
10	Parit Teratak Air Hitam	Desa
11	Geringging Baru	Desa
12	Marsawa	Desa
13	Langsat Hulu	Desa
14	Muara Langsat	Desa
15	Geringging Jaya	Desa

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Singingi Hilir pada tahun 2016 adalah 28.544 Jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 164,99 / Km². Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan kuantan singingi hilir berjumlah 14.627 Jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 13.917 Jiwa. Perbandingan Sex Rasionya adalah sebesar 105,10%. Artinya, dalam 100 orang perempuan, terdapat 105 orang laki-laki. Sedangkan jumlah Rumah Tangga di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah 7.195 Kepala Keluarga. Dimana rata-rata per rumah tangga beranggotakan 3,9 atau 4 orang. Lebih jelasnya mengenai kondisi penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pulau Kopung	763	748	1.511
2	Kampung Baru	1.180	1.170	2.350
3	Koto Sentajo	764	750	1.514
4	Muaro Sentajo	1.156	1.182	2.338
5	Pulau Komang	886	895	1.781
6	Beringin Jaya	1.114	1.075	2.189
7	Jalur Patah	628	624	1.252
8	Teratak Air Hitam	512	499	1.011
9	Seberang Teratak Air Hitam	165	160	325
10	Parit Teratak Air Hitam	439	392	831
11	Geringging Baru	1.198	1.090	2.288
12	Marsawa	1.814	1.676	3.490
13	Langsat Hulu	1.559	1.430	2.989
14	Muara Langsat	1.571	1.476	3.047
15	Geringging Jaya	878	750	1.628
Jumlah		14.627	13.917	28.554

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

Melalui tabel tersebut, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Marsawa, dan paling sedikit terdapat di Desa Seberang Teratak Air Hitam. Namun, Desa dengan kepadatan tertinggi adalah Desa Langsat Hulu dan Desa Garingging Baru. Berikut kepadatan penduduk di Kecamatan kuantan singingi hilir Tahun 2016.

Tabel IV.6 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pulau Kopung	1.511	6	251,83
2	Kampung Baru	2.350	9	261,11
3	Koto Sentajo	1.514	6	252,33
4	Muaro Sentajo	2.338	8	292,25
5	Pulau Komang	1.781	8	222,62
6	Beringin Jaya	2.189	11	199,00
7	Jalur Patah	1.252	28	44,71
8	Teratak Air Hitam	1.011	17	59,47
9	Seberang Teratak Air Hitam	325	28	11,61
10	Parit Teratak Air Hitam	831	17	48,88
11	Geringging Baru	2.288	5	457,60
12	Marsawa	3.490	9	387,77
13	Langsat Hulu	2.989	6	498,16
14	Muara Langsat	3.047	10	304,70
15	Geringging Jaya	1.628	5	325,60
	Jumlah		173	100%

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

5. Sosial

Aspek sosial yang dideskripsikan dalam penelitian ini meliputi sarana sekolah, kesehatan, dan sarana ibadah. Sarana sekolah yang di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah 16 TK, 22 SD, 20 MDA, 7 SMP, 1 MTs, 2 SMA, dan 1 SMK Kelas Jauh. Sarana kesehatan di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah 2 Puskesmas, 1 Poliklinik, 6 Poskesdes, dan 6 Puskesmas Pembantu (Pustu), dengan tenaga kesehatan sebanyak 58 orang, yaitu 2 orang dokter umum, 46 orang bidan, dan 1 orang dukun bayi.

Sedangkan sarana ibadah adalah 30 Masjid, 81 Mushola, dan 1 Gereja.

Berikut sebaran sarana sosial di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir.

Tabel IV.7 Sebaran Sarana Sekolah di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Tahun 2016

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah							Jlh
		TK	SD	MDA	SMP	MTs	SMA	SMK	
1	Pulau Kopung	1	1	-	1	-	-	-	3
2	Kampung Baru	1	1	-	-	1	-	-	3
3	Koto Sentajo	-	2	1	-	-	-	-	3
4	Muaro Sentajo	1	1	1	1	-	1	-	5
5	Pulau Komang	1	1	1	-	-	-	-	3
6	Beringin Jaya	1	2	1	1	-	-	-	5
7	Jalur Patah	1	1	1	-	-	-	-	3
8	Teratak Air Hitam	1	1	1	-	-	-	-	3
9	Seberang Teratak Air Hitam	-	-	1	1	-	-	1	3
10	Parit Teratak Air Hitam	1	1	-	-	-	-	-	2
11	Geringging Baru	2	3	3	1	-	-	-	9
12	Marsawa	3	3	5	1	-	1	-	13
13	Langsat Hulu	1	2	2	-	-	-	-	5
14	Muara Langsat	1	2	2	1	-	-	-	6
15	Geringging Jaya	1	1	1	-	-	-	-	3
Jumlah		16	22	20	7	1	2	1	69

Sumber: UPTD Pendidikan dan Depag Kecamatan kuantan singingi hilir

Sarana sekolah terlengkap terdapat di Desa Muaro Sentajo dan Desa Marsawa, yaitu adanya TK hingga SMA. Jumlah sarana sekolah terbanyak adalah SD dan MDA. Jumlah sarana sekolah paling sedikit adalah MTs dan SMK. Total jumlah sarana sekolah di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah 69 sekolah. Kemudian sebaran sarana kesehatan di Kecamatan kuantan singingi hilir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.8 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Tahun 2016

No.	Desa / Kelurahan	Rumah Sakit	Poli klinik	Puskesmas	Pos kesdes	Pustu	Pos yandu	Apotik
1	Pulau Kopung	-	-	-	-	1	1	-
2	Kampung Baru	-	-	-	-	1	2	-
3	Koto Sentajo	-	-	1	-	-	1	-
4	Muaro Sentajo	-	-	-	1	-	1	-
5	Pulau Komang	-	-	-	1	-	1	-
6	Beringin Jaya	-	-	-	1	1	3	-
7	Jalur Patah	-	-	-	1	-	1	-
8	Teratak Air Hitam	-	-	-	1	-	2	-
9	Seberang Teratak Air Hitam	-	-	-	-	-	1	-
10	Parit Teratak Air Hitam	-	-	-	-	1	1	-
11	Geringging Baru	-	1	1	1	-	2	-
12	Marsawa	-	-	-	-	-	4	-
13	Langsat	-	-	-	-	1	2	-

No.	Desa / Kelurahan	Rumah Sakit	Poli klinik	Puskesmas	Pos kesdes	Pustu	Pos yandu	Apotik
	Hulu							
14	Muara Langsat	-	-	-	-	1	2	-
15	Geringging Jaya	-	-	-	-	-	2	-
	Jumlah	0	1	1	6	6	26	0

Sumber: UPTD Kesehatan Kecamatan kuantan singingi hilir

Sarana Kesehatan terbanyak terdapat di Desa Geringging Baru, yaitu 1 Poliklinik, 1 Puskesmas, 1 Poskesdes, dan 2 Posyandu. Tidak ada sarana apotik di Desa/Kelurahan di Kecamatan kuantan singingi hilir. Total ada 40 sarana kesehatan di Kecamatan kuantan singingi hilir. Sedangkan sarana ibadah di Kecamatan kuantan singingi hilir dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut ini.

Tabel IV.9 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan kuantan singingi hilir Tahun 2016

No.	Desa / Kelurahan	Masjid	Mushola	Geraja	Lainnya	Jlh
1	Pulau Kopung	1	4	-	-	5
2	Kampung Baru	2	8	-	-	10
3	Koto Sentajo	1	5	-	-	6
4	Muaro Sentajo	1	4	-	-	5
5	Pulau Komang	1	4	-	-	5
6	Beringin Jaya	1	7	-	-	8
7	Jalur Patah	2	4	-	-	6
8	Teratak Air Hitam	1	1	-	-	2
9	Seberang Teratak Air	1	1	-	-	2

No.	Desa / Kelurahan	Masjid	Mushola	Geraja	Lainnya	Jlh
	Hitam					
10	Parit Teratak Air Hitam	1	1	-	-	2
11	Geringging Baru	4	6	-	-	10
12	Marsawa	4	13	-	-	17
13	Langsat Hulu	6	12	-	-	18
14	Muara Langsat	3	7	1	-	11
15	Geringging Jaya	1	4		-	5
	Jumlah	30	81	1	-	112

Sumber: Depag Kecamatan kuantan singingi hilir

Sarana ibadah yang paling banyak di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah Mushola, dan paling sedikit adalah Gereja. Mushola terbanyak terdapat di Desa Marsawa, yaitu 13 Mushola. Jumlah sarana ibadah terbanyak terdapat di Desa Langsat Hulu, yaitu 18 sarana ibadah, berupa 6 Masjid dan 12 Mushola. Total sarana ibadah di Kecamatan kuantan singingi hilir adalah 112 tempat ibadah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 30 orang masyarakat Desa Suka Ramai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Identitas responden dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Adapun identitas yang diisi oleh responden meliputi umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Hasilnya diperoleh sebagai berikut ini.

1. Umur

Data mengenai umur langsung diisi dalam bentuk angka oleh 30 orang responden masyarakat pada lembar kuesioner. Melalui data-data umur, diperoleh rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel V.1: Karakteristik Responden Masyarakat Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	14 – 19 Tahun	-	-
2	20 – 25 Tahun	4	13,33%
3	26 – 30 Tahun	7	23,33%
4	31 – 35 Tahun	21	70.00%
5	36 – 40 Tahun	3	10.00%
6	> 41 Tahun	5	16,67%
Jumlah		30	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel V.1 tersebut, rentang usia 31 – 35 tahun adalah rentang usia terbanyak, yaitu 21 orang (70%) dari 30 responden yang diteliti. Usia terbanyak

kedua adalah rentang usia 26 – 30 tahun, yaitu 7 responden (23,33%). Kemudian disusul oleh rentang usia > 41 tahun dengan 5 responden (16,67%). Responden rentang usia antara 20 – 25 tahun sebanyak 4 orang responden (13,33%), dan responden paling sedikit berusia antara 36 – 40 tahun sebanyak 3 responden (10%).

Sedangkan untuk umur yang diisi oleh responden ketua BPD, anggota BPD dan kepala desa diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.2: Karakteristik Responden Ketua BPD, Anggota BPD dan Kepala Desa Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	14 – 19 Tahun	-	-
2	20 – 25 Tahun	-	-
3	26 – 30 Tahun	3	37,50%
4	31 – 35 Tahun	1	12,50%
5	36 – 40 Tahun	2	25,00%
6	> 41 Tahun	2	25,00%
Jumlah		8	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel V.2 tersebut, rentang usia 26 – 30 tahun adalah rentang usia terbanyak, yaitu 3 orang (37,50%) dari 8 responden yang diteliti. Usia terbanyak kedua adalah rentang usia 36 – 40 tahun dan >41 tahun yang masing-masingnya sebanyak 2 responden (25,00%). Kemudian disusul oleh rentang usia 31-35 tahun dengan 1 responden (12,50%).

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden diketahui setelah seluruh responden memberikan jawaban mengenai jenis kelamin pada lembaran kuesioner yang telah disediakan.

Berdasarkan data mengenai jenis kelamin responden, diperoleh rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel V.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	21	70,00%
2	Perempuan	9	30,00%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Melalui Tabel V.3 tersebut, bahwa rata-rata responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu 21 orang atau 70% dari total jumlah seluruh responden yang diteliti. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan ada 9 orang atau 30% dari total responden.

Sedangkan untuk jenis kelamin yang diisi oleh responden ketua BPD, anggota BPD dan kepala desa diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.4: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	37,50%
2	Perempuan	5	62,50%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Melalui Tabel V.4 tersebut diketahui bahwa rata-rata responden adalah berjenis kelamin perempuan yaitu 5 orang atau 62,50% dari total jumlah seluruh

responden yang diteliti. Sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki ada 3 orang atau 37,50% dari total responden.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner adalah bervariasi. Namun, untuk mempermudah penyajian data mengenai tingkat pendidikan responden, maka secara garis besar dikelompokkan menjadi beberapa jenis pendidikan seperti sebagai berikut.

Tabel V.5: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Pascasarjana (S2/S3)	2	5,26%
2	Perguruan Tinggi (S1)	14	36,84%
3	SMA / sederajat	19	50,00%
4	SMP / sederajat	3	7,89%
5	SD / sederajat	-	-
6	Tidak Tamat Sekolah	-	-
7	Tidak Sekolah	-	-
Jumlah		38	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Terdapat empat kategori pendidikan sebagaimana Tabel V.5 di atas diketahui bahwa rata-rata responden yang diteliti umumnya adalah tamat SMA/sederajat sebanyak 19 orang (50%), tamat perguruan tinggi (S1) sebanyak 14

orang (36,84%), tamat SMP/ sederajat sebanyak 3 orang (7,89%) dan sisanya pascasarjana sebanyak 2 orang (5,26%).

B. Hasil Penelitian tentang Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan 8 orang *key informan*, yaitu wawancara dengan Ketua BPD, Anggota BPD, dan Kepala Desa Suka Damai. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari jawaban kuesioner 30 orang responden yaitu masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir.

Masing-masing pertanyaan wawancara dan kuesioner disusun berdasarkan indikator penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Dimana untuk indikator masing-masing indikator diberikan dua pertanyaan. Hasil wawancara dan kuesioner dari indikator-indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Adapun rekapitulasi hasil jawaban angket oleh 30 orang masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir mengenai penentuan standar pelaksanaan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut.

Tabel V.6: Jawaban Angket Mengenai Indikator Penentuan Standar Pelaksanaan

No	Pertanyaan Tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan perencanaan APBDes memiliki fungsi dalam penentuan standar pelaksanaan APBDes	5 (16,67%)	23 (76,67%)	2 (6,67%)	30 (100%)
2	Pengawasan hasil ketetapan APBDes memiliki fungsi dalam penentuan standar pelaksanaan APBDes	8 (26,67%)	20 (66,67%)	2 (6,67%)	30 (100%)
Jumlah		13	43	4	60
Rata-rata		6	22	2	30
Persentase		20%	73,33%	6,67%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator penentuan standar pelaksanaan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai pada pertanyaan pertama yakni terkait dengan Pengawasan perencanaan APBDes memiliki fungsi dalam penentuan standar pelaksanaan APBDes yang menjawab pada kategori Berfungsi sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 16,67%. Kemudian pada kategori Cukup Berfungsi sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 76,67%. Sedangkan pada kategori Kurang Berfungsi sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 6,67%.

Kemudian pada pertanyaan terkait dengan pengawasan hasil ketetapan APBDes memiliki fungsi dalam penentuan standar pelaksanaan APBDes yang menjawab Berfungsi sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 26,67%. Yang menjawab Cukup berfungsi sebanyak 20 orang dengan persentase 66,67% dan yang menjawab Tidak Berfungsi sebanyak 2 dengan persentase 6,67%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak H. Rusli SE tentang Penentuan Standar Pelaksanaan diungkapkan bahwa:

Sejauh ini dalam hal penentuan Standar Pelaksanaan selalu dilakukan melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak terkait dan juga pemuka masyarakat desa, sehingga saran dan masukan diberikan oleh berbagai pihak (Rabu 4 November 2020)

Melalui hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan indikator Penentuan Standar Pelaksanaan di Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berfungsi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat dari pengawasan hasil ketetapan APBDes memiliki fungsi dalam penentuan standar pelaksanaan APBDes.

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Adapun rekapitulasi hasil jawaban angket oleh 30 orang masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir mengenai penentuan pengukuran

pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut.

Tabel V.7: Jawaban Angket Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

No	Pertanyaan Tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil kegiatan pembangunan yang ada berjalan sesuai dengan fungsinya	8 (26,67%)	16 (53,33%)	6 (20%)	30 (100%)
2	Hasil anggaran pembangunan fungsinya sudah sesuai dengan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	5 (16,67%)	21 (70%)	4 (13,33%)	30 (100%)
Jumlah		13	37	10	60
Rata-rata		6	19	5	30
Persentase		20%	63,33%	16,67%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai pada pertanyaan pertama yakni terkait dengan hasil kegiatan pembangunan yang ada berjalan sesuai dengan fungsinya yang menjawab pada kategori Berfungsi sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 26,67%. Kemudian pada kategori Cukup Berfungsi sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 53,33%. Sedangkan pada kategori Kurang Berfungsi sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 20%.

Kemudian pada pertanyaan terkait dengan hasil anggaran pembangunan fungsinya sudah sesuai dengan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang menjawab Berfungsi sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 16,67%. Yang menjawab Cukup berfungsi sebanyak 21 orang dengan persentase 70% dan yang menjawab Tidak Berfungsi sebanyak 4 dengan persentase 13,33%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nur Ahmad S.Pdi tentang Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan diungkapkan bahwa:

Masyarakat secara umum sudah merasakan manfaat dari hasil dari pembangunan, yang anggarannya sudah disesuaikan dengan ketentuan BPD dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (Rabu, 4 November 2020)

Melalui hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan di Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berfungsi karena sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari hasil anggaran pembangunan fungsinya sudah sesuai dengan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri,

gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Adapun rekapitulasi hasil jawaban angket oleh 30 orang masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir mengenai pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut.

Tabel V.8: Jawaban Angket Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

No	Pertanyaan Tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil pengawasan berfungsi dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan	4 (13,33%)	24 (80%)	2 (6,67%)	30 (100%)
2	Dampak pengawasan APBDes terhadap pembangunan berfungsi sesuai dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan	8 (26,67%)	21 (70%)	1 (3,33%)	30 (100%)
Jumlah		12	45	3	60
Rata-rata		6	23	1	30
Persentase		20%	76,67%	3,33%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai pada pertanyaan pertama yakni terkait denganh pengawasan berfungsi dalam

pengukuran pelaksanaan kegiatan yang menjawab pada kategori Berfungsi sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 13,33%. Kemudian pada kategori Cukup Berfungsi sebanyak 24 orang dengan persentase sebesar 80%. Sedangkan pada kategori Kurang Berfungsi sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 6,67%.

Kemudian pada pertanyaan terkait dengan dampak pengawasan APBDes terhadap pembangunan berfungsi sesuai dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang menjawab Berfungsi sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 26,67%. Yang menjawab Cukup berfungsi sebanyak 21 orang dengan persentase 70% dan yang menjawab Tidak Berfungsi sebanyak 1 dengan persentase 3,33%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nur Ahmad S.Pdi tentang pengukuran pelaksanaan kegiatan diungkapkan bahwa:

Menurut saya pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah berfungsi sesuai dengan standar yang ditentukan, walaupun demikian masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dalam pelaksanaannya..ya menurut saya itu wajar saja yaa....(Rabu 4 November 2020)

Melalui hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan di Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berfungsi karena sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan walaupun masih memerlukan beberapa perbaikan. Hal ini dapat diketahui dari dampak dilakukannya pengawasan APBDes terhadap pembangunan yang sudah berfungsi sesuai dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Adapun rekapitulasi hasil jawaban angket oleh 30 orang masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir mengenai perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut.

Tabel V.9: Jawaban Angket Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

No	Pertanyaan Tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan APBDes dengan ketetapan pembangunan dilapangan berfungsi sesuai standar perbandingan dan pelaksanaan	7 (23,33%)	22 (73,33%)	1 (3,33%)	30 (100%)
2	Pengawasan APBDes terhadap pencapaian kegiatan berfungsi sesuai standar perbandingan	5 (16,67%)	21 (70%)	4 (13,33%)	30 (100%)

No	Pertanyaan Tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
	dan pelaksanaan				
	Jumlah	12	43	5	60
	Rata-rata	6	22	2	30
	Persentase	20%	73,33%	6,67%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai pada pertanyaan pertama yakni terkait dengan pengawasan APBDes dengan ketetapan pembangunan dilapangan berfungsi sesuai standar perbandingan dan pelaksanaan yang menjawab pada kategori Berfungsi sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 23,33%. Kemudian pada kategori Cukup Berfungsi sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 73,33%. Sedangkan pada kategori Kurang Berfungsi sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 3,33%.

Kemudian pada pertanyaan terkait dengan pengawasan APBDes terhadap pencapaian kegiatan berfungsi sesuai standar perbandingan dan pelaksanaan yang menjawab Berfungsi sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 16,67%. Yang menjawab Cukup berfungsi sebanyak 21 orang dengan persentase 70% dan yang menjawab Tidak Berfungsi sebanyak 4 dengan persentase 13,33%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nur Ahmad S.Pdi tentang perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja diungkapkan bahwa:

Menurut saya pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah berfungsi sesuai dengan standar yang ditentukan, walaupun demikian masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dalam pelaksanaannya..ya menurut saya itu wajar saja yaa....(Rabu 4 November 2020)

Melalui hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berfungsi karena sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga penyimpangan yang mungkin ditemukan dapat segera diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan APBDes dengan ketetapan pembangunan dilapangan yang sudah berfungsi sesuai standar perbandingan dan pelaksanaan.

Usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan untuk melakukan penyesuaian antara hasil dari proses dengan kerja yang dihasilkan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengubah standar, perbaikan pelaksanaan atau kedua tindakan tersebut dapat dilakukan bersama-sama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dilakukan dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditentukan pada saat

tahap awal atau perencanaan APBDes Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Apabila BPD telah menyetujui laporan dari hasil perbandingan tersebut maka laporan pertanggungjawaban tersebut dapat disahkan.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Adapun rekapitulasi hasil jawaban angket oleh 30 orang masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir mengenai pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut.

Tabel V.10: Jawaban Angket Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

No	Pertanyaan Tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
1	melakukan perubahan bentuk pengawasan berfungsi sebagai pengambilan tindakan koreksi	2 (6,67%)	21 (70%)	7 (23,33%)	30 (100%)
2	evaluasi hasil kegiatan pengawasan berfungsi sebagai pengambilan tindakan koreksi	6 (20%)	21 (70%)	3 (10%)	10 (100%)
Jumlah		8	42	10	60
Rata-rata		4	21	5	30
Persentase		13,33%	70%	16,67%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai pada pertanyaan pertama yakni terkait dengan pengawasan APBDes dengan ketetapan pembangunan dilapangan berfungsi sesuai standar perbandingan dan pelaksanaan yang menjawab pada kategori Berfungsi sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 6,67%. Kemudian pada kategori Cukup Berfungsi sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 70%. Sedangkan pada kategori Kurang Berfungsi sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 32,33%.

Kemudian pada pertanyaan terkait dengan pengawasan APBDes terhadap evaluasi hasil kegiatan pengawasan berfungsi sebagai pengambilan tindakan koreksi yang menjawab Berfungsi sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 20%. Yang menjawab Cukup berfungsi sebanyak 21 orang dengan persentase 70% dan yang menjawab Tidak Berfungsi sebanyak 3 dengan persentase 10%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nur Ahmad S.Pdi tentang pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan diungkapkan bahwa:

Koreksi itu sudah pasti diperlukan, dengan adanya koreksi maka kita mengetahui hala-hal apa yang memerlukan perbaikan dengan segera, yang mesti kita ubah, sehingga kekeliruan yang sama tidak terulang lagi dikemudian hari (Rabu 4 November 2020)

Melalui hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan indikator pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

sudah cukup berfungsi karena sudah melakukan perubahan bentuk pengawasan berfungsi sebagai pengambilan tindakan koreksi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang mana fungsi pengawasan BPD berusaha mendapatkan aspirasi dari masyarakat desa secara keseluruhan sehingga diperoleh hasil yang sebenarnya dan menyeluruh, dengan kata lain BPD tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan melalui forum-forum saja.

C. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya agar lebih jelas dan tertata perlu dirangkum dalam sebuah tabel persentase yang memiliki hubungan yang langsung terkait dengan setiap indikator tersebut. Tabel tersebut berisi lima indikator serta tingkat pengawasan dalam bentuk persentase yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel V.11: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	2	3	4	5	6
1	Penentuan Standar Pelaksanaan	6	22	2	30
		20 %	73,33 %	6,67 %	100 %
2	Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	6	19	5	30
		20 %	63,33%	16,67%	100 %
3	Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	6	23	1	30
		20%	76,67%	3,33%	100 %
4	Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisis	6	22	2	30
		20%	73,33%	6,67%	100%

	Penyimpangan				
5	Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	4	21	5	30
		13,33%	70%	16,67%	100%
Jumlah		28	107	15	150
Rata-rata		6	21	3	30
Persentase		18,67%	71,33%	10%	100 %
Kategori		Cukup Berfungsi			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel V.11 yang menjelaskan rekapitulasi jawaban dari responden tentang pengawasan untuk indikator penentuan standar pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa Suka Damai di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori “Cukup Berfungsi”. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 orang responden (20%) menjawab berfungsi, sebanyak 22 orang responden (73,33%) menjawab cukup berfungsi dan sisanya sebanyak 2 orang responden (6,67) menjawab kurang berfungsi.

Rekapitulasi jawaban dari responden tentang pengawasan untuk indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa Suka Damai di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori “Cukup Berfungsi”. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 orang responden (20%) menjawab berfungsi, sebanyak 19 orang responden (63,33%) menjawab cukup berfungsi dan sisanya sebanyak 5 orang responden (16,67) menjawab kurang berfungsi.

Rekapitulasi jawaban dari responden tentang pengawasan untuk indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa Suka Damai di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berada pada

kategori “Cukup Berfungsi”. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 orang responden (20%) menjawab berfungsi, sebanyak 23 orang responden (76,67%) menjawab cukup berfungsi dan sisanya sebanyak 1 orang responden (3,33) menjawab kurang berfungsi.

Rekapitulasi jawaban dari responden tentang pengawasan untuk indikator pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa Suka Damai di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori “Cukup Berfungsi”. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 orang responden (20%) menjawab berfungsi, sebanyak 22 orang responden (73,33%) menjawab cukup berfungsi dan sisanya sebanyak 2 orang responden (6,67) menjawab kurang berfungsi.

Rekapitulasi jawaban dari responden tentang pengawasan untuk indikator pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa Suka Damai di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori “Cukup Berfungsi”. Hal ini terlihat dari sebanyak 4 orang responden (13,33%) menjawab berfungsi, sebanyak 21 orang responden (70 %) menjawab cukup berfungsi dan sisanya sebanyak 5 orang responden (16,67) menjawab kurang berfungsi.

D. Faktor Penghambat Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Khoirudin dan bapak Sukirno mengungkapkan bahwa rata-rata kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang aktif atau kurangnya pengalaman berorganisasi sehingga menjadi faktor penghambat untuk membangun desa yang lebih baik.

2. Sumber Dana

Hal yang paling memicu dalam faktor penghambat adalah sumber dana. Dalam artinya sumber dana yang di berikan oleh APBN, kapupaten, hibah dan lain-lain tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh lembaga pemerintahan desa. Karena dalam setiap setahun sekali anggaran itu sudah bagus di buat dan rinci namun tidak sesuai dengan sumber dana tersebut, sehingga proses pelaksanaan program yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

BAB VI

KESIMPULN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah terkelola dengan optimal. Jika dilihat dari 5 indikator pengawasan anggaran yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator pertama tentang penentuan standar pelaksanaan diketahui rata-rata responden menyatakan penentuan standar pelaksanaan adalah baik;
2. Indikator kedua tentang penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan diketahui rata-rata responden menyatakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah baik;
3. Indikator ketiga tentang pengukuran pelaksanaan kegiatan diketahui rata-rata responden menyatakan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah baik;
4. Indikator keempat tentang perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan diketahui rata-rata responden menyatakan perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah baik;
5. Indikator kelima tentang pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan diketahui rata-rata responden menyatakan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah baik;

Faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sumberdaya manusia (SDM) dan sumber dana.

B. Saran

Melalui kesimpulan penelitian, maka penulis menyampaikan beberapa saran, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak desa untuk lebih meningkat kesadaran masyarakat agar lebih aktif dan berperan serta dalam berorganisasi sehingga pembangunan desa dapat lebih baik lagi.
2. Disarankan kepada pihak BPD agar mempertahankan pengawasannya mempertahankan dan semakin meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sehingga masyarakat semakin banyak merasakan hasil dari pengawasan tersebut.
3. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penambahan variabel lain sehingga mendapatkan hasil yang lebih jelas lagi mengenai anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- A.U baeidillah dan Abdul Rozak, 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Berkaitan dengan otonomi asli.
- Gibson, James L, 2000, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, (Jilid II)*, Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Melayu, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Held, David, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*, Terjemahan: Damanhuri, Yogyakarta: Pusta Pelajar.
- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Juliantara, Wijaya, 2000. *Pembaharuan Kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pembaharuan.
- _____. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, pril 1993.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Salemba Humanika; Jakarta.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Refika Aditama.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Prajudi Atmosudirdjo.1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rumanti, Maria Assumpta Sr, 2002, *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik*, Penerbit PT. Grafindo, Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- L.P. Sinambela, Imu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. (2007) *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia.
- Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*. Gramedia; Bandung.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 2005. *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru UIR Perss.

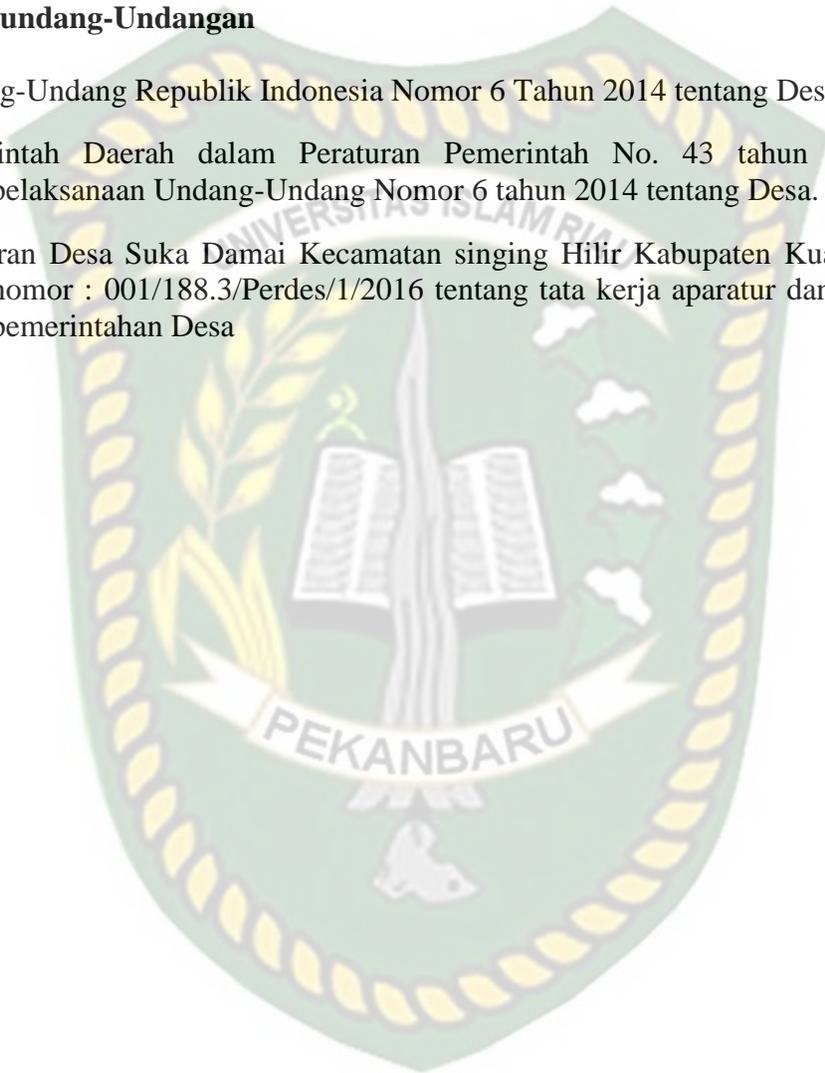
_____,2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, FISIPOL UIR Pekanbaru.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Desa Suka Damai Kecamatan singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 001/188.3/Perdes/1/2016 tentang tata kerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan Desa





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 1431 /A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Oktavianti Dewi
NPM : 157110052
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
Persentase Plagiasi : 28 % (76 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK 970702230